

BAB II

KONTEKS DERADIKALISASI DAN PERAN ACCEPT INTERNATIONAL DI INDONESIA

2.1 Konteks Deradikalisasi di Indonesia

Deradikalisasi merupakan salah satu strategi utama dalam upaya penanggulangan ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan keamanan yang bersifat represif, deradikalisasi menekankan pada perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku individu yang telah terpapar ideologi radikal. Dalam konteks ini, deradikalisasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan, tetapi juga sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi individu yang pernah terlibat dalam jaringan ekstremisme.

Dinamika deradikalisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan karakter ancaman ekstremisme yang semakin kompleks. Perkembangan terorisme menunjukkan pergeseran dari jaringan terorganisir menuju pola yang lebih tersebar dan berbasis individu (Jones, 2022). Perubahan ini membuat pendekatan keamanan konvensional tidak lagi cukup dalam menanggulangi radikalisme. Ancaman tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui penyebaran ideologi di ruang sosial dan digital. Situasi ini menuntut pendekatan yang mampu menjangkau dimensi sosial individu secara langsung. Kondisi tersebut membuka ruang bagi aktor non-negara seperti Accept International untuk terlibat dalam proses deradikalisasi.

Transformasi pola radikalisisasi di Indonesia menunjukkan peningkatan peran ruang digital dalam proses rekrutmen dan penyebaran ideologi ekstrem. Data menunjukkan bahwa propaganda kini banyak dilakukan melalui platform tertutup yang sulit diawasi oleh negara (BNPT, 2024). Perubahan ini menyebabkan radikalisisasi menjadi lebih tersembunyi dan sulit dideteksi secara struktural. Pendekatan berbasis keamanan tidak mampu menjangkau interaksi sosial yang terjadi di ruang privat dan digital. Kondisi ini menuntut intervensi yang lebih fleksibel dan berbasis relasi interpersonal. Hal ini menjelaskan mengapa pendekatan yang digunakan oleh Accept International menjadi relevan dalam menjangkau individu sasaran.

Selain faktor digital, radikalisisasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang saling berkaitan. Rusyidi et al. (2019) menunjukkan bahwa ideologi, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya kohesi sosial menjadi faktor utama. Individu yang mengalami keterbatasan ekonomi dan sosial lebih rentan terhadap narasi ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa radikalisisasi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial individu. Pendekatan yang hanya berfokus pada ideologi tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang stabil. Oleh karena itu, program deradikalisisasi dirancang untuk mencakup berbagai dimensi tersebut guna menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan (Shafieiou & Haq, 2023; Makhmudah, 2025). Hal ini menjadi dasar bagi pendekatan rehabilitasi sosial yang digunakan oleh Accept International.

Secara konseptual, deradikalisasi melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu rehabilitasi, *disengagement*, dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi berfokus pada perubahan pemahaman ideologis individu, sementara *disengagement* berkaitan dengan pelepasan individu dari jaringan ekstremis. Selanjutnya, reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan individu ke dalam masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan relasi sosial. Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan proses deradikalisasi secara keseluruhan.

Di Indonesia, pelaksanaan program deradikalisasi umumnya berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga negara yang memiliki mandat dalam penanganan terorisme. BNPT mengembangkan berbagai program yang mencakup pembinaan narapidana terorisme, edukasi masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa deradikalisasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dalam implementasinya.

Pendekatan negara dalam deradikalisasi masih didominasi oleh strategi keamanan dan kontrol institusional. BNPT dan aparat keamanan berperan dalam menekan ancaman melalui penindakan dan program pembinaan (BNPT, 2023). Meskipun efektif dalam jangka pendek, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau dimensi sosial individu. Proses reintegrasi sering mengalami hambatan karena rendahnya

penerimaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara kebijakan dan realitas sosial di lapangan. Celah ini menjadi ruang masuk bagi Accept International untuk mengisi aspek yang tidak dijangkau oleh negara.

Keterbatasan tersebut terlihat dari masih adanya tingkat residivisme mantan narapidana terorisme. Data BNPT menunjukkan sekitar 12% mantan narapidana kembali terlibat dalam jaringan ekstremis (BNPT, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa perubahan yang dihasilkan belum sepenuhnya berkelanjutan. Permasalahan utama terletak pada kurangnya dukungan sosial dan ekonomi setelah pembebasan. Hal ini menunjukkan bahwa deradikalisasi membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar pembinaan ideologis. Pendekatan berbasis rehabilitasi sosial seperti yang dilakukan Accept International menjadi relevan dalam menjawab masalah ini.

Selain itu, stigma sosial terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Masyarakat cenderung memberikan label negatif yang mempersempit ruang sosial individu tersebut. Kondisi ini memperkuat isolasi sosial dan meningkatkan risiko kembali ke jaringan lama. Pendekatan negara tidak selalu mampu mengatasi persoalan ini karena keterbatasan interaksi di tingkat komunitas. Dibutuhkan aktor yang mampu membangun kembali kepercayaan melalui pendekatan interpersonal. Peran ini dijalankan oleh Accept International melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan humanis.

Seiring dengan berkembangnya praktik deradikalisasi, muncul kesadaran bahwa pendekatan yang efektif tidak hanya bergantung pada peran negara, tetapi juga pada keterlibatan aktor non-negara melalui model *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya kerja sama antaraktor seperti organisasi masyarakat sipil dan aktor internasional dalam menyelesaikan permasalahan kompleks seperti radikalisme (Ansell, C., & Gash, A., 2008). Dalam kerangka ini, aktor non-negara memiliki keunggulan dalam menjangkau komunitas secara lebih dekat dan membangun hubungan personal dengan individu melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan institusi negara yang cenderung bersifat formal dan birokratis, sehingga proses deradikalisasi menjadi lebih efektif, khususnya dalam perubahan perilaku dan reintegrasi sosial.

Lebih lanjut, deradikalisasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika global, di mana isu radikalisme tidak lagi dipandang sebagai permasalahan domestik semata, tetapi sebagai isu lintas negara. Hal ini mendorong adanya keterlibatan aktor internasional dalam mendukung program deradikalisasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penanganan radikalisme memerlukan kerja sama lintas batas yang melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang yang berbeda.

Dengan demikian, konteks deradikalisasi di Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang kompleks dan multidimensional, yang

melibatkan berbagai aktor serta pendekatan yang berbeda. Deradikalisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai strategi yang mencakup aspek ideologis, sosial, dan psikologis. Pendekatan yang bersifat kolaboratif dan inklusif menjadi kunci dalam menciptakan program deradikalisasi yang efektif dan berkelanjutan.

Kondisi ini sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan aktor non-negara, termasuk organisasi internasional, untuk berperan dalam mendukung program deradikalisasi di Indonesia yang mencerminkan adanya pergeseran dalam praktik penanganan radikalisme, dari yang sebelumnya berpusat pada negara menjadi lebih terbuka terhadap kolaborasi lintas aktor. Dalam konteks ini, kehadiran aktor non-negara menjadi penting karena mampu menjangkau komunitas secara langsung melalui pendekatan berbasis relasi sosial yang lebih adaptif, sehingga kontribusi dalam meningkatkan efektivitas deradikalisasi. Accept International hadir sebagai *international non-governmental organization* yang membawa pengalaman global dalam rehabilitasi sosial. Posisi ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak hanya melengkapi peran negara, tetapi juga mengisi celah yang ada. Hal ini menjadikan Accept International sebagai aktor yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

2.2 Strategi dan Kebijakan melalui Pendekatan Deradikalisasi di Indonesia

Pendekatan deradikalisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan nasional yang dirancang untuk menangani ancaman ekstremisme secara sistematis. Negara, melalui berbagai institusi, memainkan peran sentral dalam merumuskan strategi, regulasi, serta implementasi program deradikalisasi. Strategi pemerintah Indonesia dalam penanganan terorisme menunjukkan pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Pembentukan BNPT serta penguatan regulasi melalui UU No. 5 Tahun 2018 menunjukkan upaya negara dalam mengintegrasikan penindakan dan pencegahan. Pendekatan ini mencakup aspek keamanan, ideologi, serta rehabilitasi sosial bagi individu yang terlibat dalam jaringan ekstremisme. Negara memposisikan diri sebagai aktor utama yang mengendalikan arah kebijakan deradikalisasi. Namun, pendekatan ini tetap beroperasi dalam kerangka institusional yang bersifat formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah memiliki batas dalam menjangkau dimensi sosial individu secara langsung.

Pendekatan represif melalui Densus 88 terbukti efektif dalam menekan ancaman fisik dan membongkar jaringan teror. Penangkapan dan operasi keamanan berhasil menurunkan intensitas serangan dalam beberapa tahun terakhir (ICG, 2020). Namun, pendekatan ini tidak menyentuh faktor sosial dan ideologis yang melatarbelakangi radikalisisasi. Kritik terhadap pelanggaran HAM dan kasus salah tangkap menunjukkan adanya konsekuensi dari pendekatan keamanan yang dominan (Amnesty

International, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan represif memiliki keterbatasan dalam menciptakan perubahan jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan tambahan di luar mekanisme keamanan negara.

Dalam implementasinya, kebijakan deradikalisasi di Indonesia mencakup berbagai program yang dirancang untuk menjangkau individu yang terpapar radikalisme, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di masyarakat dengan pembinaan ideologi, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, serta kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Melalui BNPT, pemerintah mulai mengembangkan pendekatan preventif berbasis deradikalisasi. Program ini mencakup asesmen, reedukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme. Pendekatan ini menunjukkan upaya negara dalam menggeser fokus dari kontrol menuju perubahan perilaku. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala dalam keberlanjutan dan efektivitas. Tingkat residivisme yang masih ada menunjukkan bahwa perubahan yang dihasilkan belum stabil (BNPT, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan negara belum sepenuhnya mampu menjangkau dimensi sosial individu.

Keterbatasan tersebut juga terlihat dalam proses reintegrasi sosial. Mantan narapidana sering menghadapi stigma dan penolakan dari masyarakat. Kondisi ini menghambat proses adaptasi kembali ke kehidupan sosial. Program pemerintah tidak selalu mampu menjangkau dinamika hubungan

sosial di tingkat komunitas. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan dan realitas di lapangan. Celah ini menjadi ruang bagi aktor non-negara untuk berperan dalam proses deradikalisasi.

Pemerintah juga mengembangkan pendekatan kolaboratif melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) dan kerja sama dengan berbagai aktor. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal menunjukkan upaya membangun koordinasi lintas aktor. Namun, koordinasi tersebut masih menghadapi kendala dalam konsistensi implementasi dan distribusi peran. Program sering berjalan parsial tanpa integrasi yang kuat antar aktor. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan banyak aktor tidak selalu menghasilkan efektivitas. Hal ini memperlihatkan kebutuhan terhadap aktor yang mampu menjembatani berbagai level tersebut.

Dalam struktur ini, organisasi internasional mulai dilibatkan sebagai mitra dalam program deradikalisasi. Keterlibatan ini menunjukkan pengakuan bahwa pendekatan negara tidak dapat berdiri sendiri dan menunjukkan bahwa penanganan radikalisme telah menjadi isu global yang memerlukan respons kolektif. Aktor internasional dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, keahlian, serta pertukaran pengetahuan yang dapat memperkuat kapasitas program deradikalisasi di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendekatan deradikalisasi semakin berkembang menuju model yang lebih terbuka dan kolaboratif. Accept

International hadir sebagai *international non-governmental organization* yang membawa pendekatan berbasis rehabilitasi sosial dan relasi interpersonal. Organisasi ini mengisi celah yang tidak sepenuhnya dijangkau oleh program pemerintah. Posisi ini menunjukkan bahwa Accept International tidak menggantikan peran negara, tetapi melengkapinya. Hal ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana strategi Accept International bekerja dalam sistem yang sudah ada.

Dengan demikian, kebijakan dan pendekatan deradikalisasi di Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang terus berkembang, yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor serta pendekatan yang berbeda. Negara tetap memegang peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan, namun efektivitas program sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu sistem tata kelola yang inklusif dan adaptif.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan deradikalisasi yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan negara sebagai aktor utama, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktor non-negara yang memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan kedekatan dengan masyarakat. Hal ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana peran aktor non-negara, khususnya organisasi internasional seperti Accept International dapat berkontribusi dalam memperkuat efektivitas deradikalisasi di Indonesia.

2.3 Peran Accept International sebagai Organisasi Non-Pemerintah Internasional dalam Konteks Deradikalisasi di Indonesia

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya ancaman ekstremisme pada lintas negara, peran *International Non-Governmental Organization (INGO)* menjadi semakin penting sebagai jembatan antara pendekatan kemanusiaan dan kebijakan keamanan. Salah satu INGO dalam bidang ini adalah Accept International, organisasi non-pemerintah berbasis di Tokyo, Jepang, yang berfokus pada isu deradikalisasi, perdamaian, dan reintegrasi sosial bagi mantan pelaku kekerasan ekstrem. Keberadaan Accept International di Indonesia mencerminkan praktik nyata di mana solidaritas global dan tanggung jawab moral lintas batas diwujudkan dalam bentuk kerja sama konkret dengan lembaga negara dan komunitas lokal.

Subbagian ini tidak hanya memberikan profil Accept International, tetapi juga melihat bagaimana organisasi ini bertindak sebagai pihak non-negara terhadap deradikalisasi di Indonesia. Penelitian ini menempatkan Accept International dalam kerangka teoritis untuk memahami bagaimana strategi, pola interaksi, dan metode berkontribusi terhadap efektivitas deradikalisasi lokal. Ini berbeda dengan informasi pada situs resmi organisasi, yang cenderung lebih deskriptif.

Accept International didirikan pada tahun 2011 oleh Mr. Yosuke Nagai dan sekelompok aktivis muda Jepang yang terinspirasi oleh nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian pasca-konflik. Berawal dari misi membantu proses reintegrasi mantan narapidana ekstremis di Timur Tengah,

organisasi ini berkembang menjadi lembaga internasional yang aktif di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa organisasi non-negara telah berkembang menjadi pelaku utama dalam masalah keamanan non-tradisional seperti deradikalisasi, dan mereka tidak lagi hanya bertindak sebagai aktor pendukung. Fokus utama Accept International adalah transformasi sosial berbasis kemanusiaan dengan prinsip bahwa setiap individu, termasuk pelaku kekerasan, memiliki potensi untuk berubah apabila diberikan kesempatan, dukungan psikologis, dan akses terhadap kehidupan bermakna.

Secara filosofis, visi organisasi ini berakar pada gagasan bahwa “*no one is beyond rehabilitation*” tidak ada individu yang terlalu terlambat untuk diterima kembali ke masyarakat. Prinsip ini sangat dekat dengan konsep *cosmopolitan ethics* yang menekankan kesetaraan moral seluruh manusia (Held, 2010). Pendekatan ini menolak dikotomi antara “pelaku” dan “korban”, melainkan melihat keduanya sebagai bagian dari sistem sosial yang perlu disembuhkan melalui empati dan kolaborasi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan Accept International memiliki basis yang kuat dalam nilai-nilai kemanusiaan universal dan juga praktis.

Hingga tahun 2025, Accept International telah beroperasi di lebih dari sepuluh negara, termasuk Jepang, Kenya, Somalia, Indonesia, dan Filipina. Keberhasilan organisasi ini terletak pada kemampuannya membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah, penegak hukum, serta komunitas

lokal untuk melaksanakan program deradikalisasi yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial masing-masing negara.

Struktur organisasi Accept International terdiri dari dewan direksi internasional yang berbasis di Tokyo, kantor regional di Asia Tenggara (Jakarta dan Manila), serta jaringan mitra lokal di beberapa provinsi Indonesia. Organisasi ini mengadopsi model *governance* horizontal, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif antara staf pusat dan tim lapangan. Dalam konteks tata kelola multilevel, model ini menekankan fleksibilitas lintas aktor dan kolaborasi horizontal. Prinsip operasional organisasi ini dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, *Acceptance* (Penerimaan), mengedepankan empati dan penerimaan terhadap individu yang terlibat dalam ekstremisme, tanpa mengabaikan aspek keadilan. Berikutnya, *Rehabilitation* (Pemulihan), yaitu menekankan proses pemulihan psikologis dan sosial sebagai fondasi reintegrasi. Selanjutnya adalah *Empowerment* (Pemberdayaan), yang memberikan kesempatan ekonomi dan pendidikan bagi mantan ekstremis agar dapat berkontribusi positif di masyarakat.

Ketiga pilar ini dijalankan dalam kerangka kerja berbasis kemitraan *multilevel* yang melibatkan lembaga pemerintah (seperti BNPT, Kemenkumham, Ditjenpas, dan Pemda), lembaga agama, mitra dan komunitas lokal, serta organisasi masyarakat sipil lokal. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program Accept International sangat bergantung pada sinergi antaraktor lintas tingkat dan lintas sektor.

Accept International mulai aktif di Indonesia pada tahun 2017, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), dan beberapa mitra dan lembaga lokal seperti Yayasan Penerimaan Internasional Indonesia (YPPI), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), dan Wahid Foundation. Program yang dijalankan di Indonesia mencakup tiga bidang utama: deradikalisasi dan rehabilitasi, reintegrasi sosial-ekonomi, dan kontra-narasi digital.

Pertama, Program Deradikalisasi dan Rehabilitasi. Program ini difokuskan pada proses pendampingan psikososial bagi mantan narapidana terorisme (napiter) yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pendekatannya berbeda dari model deradikalisasi negara yang sering kali bersifat top-down. Accept International menerapkan pendekatan dialog kemanusiaan (*human dialogue*), yaitu upaya mendengarkan pengalaman, motivasi, dan kesulitan mantan pelaku untuk menemukan titik perubahan (*turning point*) menuju kehidupan damai. Metode ini sangat berbeda dari metode negara yang biasanya bersifat *top-down*; Accept International menganggap orang sebagai objek perubahan. Melalui kerja sama dengan psikolog dan fasilitator lokal, organisasi ini telah melakukan lebih dari 300 sesi rehabilitasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan selama periode 2018–2024. Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa lebih dari 78% peserta menunjukkan perubahan sikap positif terhadap nilai-nilai toleransi dan keberagaman (Accept International Report, 2024).

Lebih lanjut, Program Reintegrasi Sosial dan Ekonomi, di mana reintegrasi menjadi aspek krusial dalam keberhasilan deradikalisasi. Banyak mantan ekstremis gagal bertahan di masyarakat bukan karena ideologi, tetapi karena kesulitan ekonomi dan sosial. Accept International menjawab persoalan ini dengan meluncurkan program kewirausahaan mikro bagi mantan pelaku terorisme dan keluarganya. Melalui dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan, organisasi ini telah membantu lebih dari 150 keluarga mantan napiter membuka usaha kecil seperti pertanian organik, bengkel motor, dan toko kelontong. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan taraf ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara mantan pelaku dan masyarakat sekitar. Program ini sejalan dengan prinsip *empowerment-based rehabilitation*, di mana reintegrasi dilihat sebagai proses memulihkan martabat manusia melalui kemandirian ekonomi dan penerimaan sosial. Ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi sangat penting untuk mencegah residivisme, yang seringkali kurang diperhatikan dalam metode keamanan konvensional.

Program terakhir adalah Kontra-Narasi Digital, timbul karena meningkatnya ancaman radikalisme daring, Accept International mengembangkan inisiatif *Digital Peace Voices* (DPV), yakni kampanye media sosial yang mempromosikan pesan toleransi, kemanusiaan, dan perdamaian. Program ini melibatkan *influencer* muda, mantan napiter, dan jurnalis lokal untuk menyebarkan konten positif yang menandingi propaganda ekstremis. Sejak 2021, kampanye DPV telah menjangkau lebih

dari 3 juta pengguna internet di Indonesia, dengan tingkat *engagement* yang tinggi di kalangan usia 18–30 tahun (Accept International, 2023). Program ini juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Google Indonesia dalam pengembangan algoritma deteksi konten ekstrem. Pendekatan ini membuktikan bahwa deradikalisasi tidak hanya dapat dilakukan di ranah fisik, tetapi juga di ruang digital, tempat ideologi ekstrem sering berakar. Ini menunjukkan bahwa strategi deradikalisasi harus menyesuaikan diri dengan ruang penyebaran ideologi yang berubah, yang sekarang tidak terbatas pada interaksi langsung tetapi juga mencakup ruang digital.

Pendekatan Accept International bersifat transformatif dan humanis, yang berbeda dari pendekatan represif negara. Organisasi ini menolak pandangan bahwa ekstremisme hanya dapat dilawan dengan kekuatan, dan justru menekankan penerimaan sebagai langkah awal perubahan. Dalam praktiknya, Accept International menggunakan model *Participatory Human Reintegration (PHR)* yang menggabungkan psikologi positif, resolusi konflik, dan pendekatan berbasis komunitas. Strategi ini menempatkan mantan pelaku ekstremisme bukan sebagai objek program, tetapi sebagai subjek perubahan, yang memiliki peran aktif dalam proses pemulihan diri dan lingkungan sosialnya. Metode ini mendukung ide bahwa deradikalisasi yang efektif membutuhkan partisipasi aktif individu daripada intervensi negara. Selain itu, organisasi ini menekankan pentingnya partisipasi keluarga dan masyarakat lokal. Studi internal menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan

reintegrasi meningkat hingga 85% apabila keluarga dan tokoh masyarakat dilibatkan secara aktif sejak awal proses rehabilitasi (Accept International, 2023).

Pendekatan seperti ini mencerminkan pandangan bahwa tanggung jawab moral terhadap perdamaian dan kemanusiaan harus melampaui batas nasional dan ideologi politik. Accept International tidak hanya membantu individu untuk pulih, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang lebih toleran dan inklusif. Hubungan antara Accept International dan pemerintah Indonesia bersifat komplementer. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara aktor negara dan non-negara bekerja sama satu sama lain, bukan kompetitif. Lembaga pemerintah tetap menjadi aktor utama dalam kebijakan deradikalisasi nasional, namun kehadiran Accept International memberikan dimensi tambahan berupa pendekatan empati dan lintas budaya.

Organisasi ini bekerja dalam kerangka *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan BNPT sejak tahun 2019, yang mencakup bidang pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, dan penelitian bersama. Selain itu, Accept International juga menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan LIPI (BRIN) dalam riset tentang efektivitas program reintegrasi berbasis komunitas. Hasil riset kolaboratif tahun 2023 menunjukkan bahwa daerah yang melibatkan lembaga internasional dalam program deradikalisasi memiliki tingkat residivisme 40% lebih rendah dibanding daerah yang hanya mengandalkan pendekatan pemerintah (BRIN, 2023).

Kolaborasi lintas lembaga antaraktor dari level internasional, nasional, hingga lokal membentuk ekosistem deradikalisasi yang lebih berkelanjutan. Meskipun Accept International telah menunjukkan hasil positif, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program di Indonesia. Pertama, masih terdapat resistensi sosial terhadap keterlibatan lembaga asing dalam isu sensitif seperti terorisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial sangat penting untuk program deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak internasional. Sebagian pihak menilai bahwa kehadiran INGO dapat mengintervensi urusan domestik, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang hati-hati untuk menjaga legitimasi di mata publik.

Kedua, keterbatasan pendanaan menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan program ke daerah rawan radikalisme di luar Jawa, seperti Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Program yang dijalankan masih sangat bergantung pada dana hibah internasional, terutama dari *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dan *United Nations Development Programme (UNDP)*.

Ketiga, tantangan terkait adaptasi budaya dan keagamaan. Pendekatan berbasis empati dan rekonsiliasi kadang sulit diterima oleh kelompok masyarakat yang masih berpandangan bahwa pelaku terorisme tidak pantas diterima kembali. Oleh karena itu, Accept International terus memperkuat kerja sama dengan tokoh agama lokal dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk membangun legitimasi sosial.

Namun demikian, prospek ke depan menunjukkan arah positif. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen untuk memperluas kolaborasi dengan aktor internasional dan dengan hal ini dapat membuka ruang bagi Accept International untuk memperluas cakupan kerja ke wilayah Indonesia bagian timur, sekaligus memperkuat dimensi kemanusiaan dalam kebijakan nasional. Secara lebih luas, Accept International diharapkan menjadi model bagi organisasi internasional lain dalam mengimplementasikan pendekatan terhadap isu keamanan non-tradisional. Organisasi ini tidak hanya memandang deradikalisasi sebagai instrumen keamanan, tetapi sebagai bagian dari proses penyembuhan sosial yang menegaskan nilai-nilai perdamaian universal.

Accept International berperan penting sebagai aktor non-negara internasional dalam upaya deradikalisasi di Indonesia. Melalui program yang berbasis kemanusiaan, empati, dan pemberdayaan, organisasi ini membuktikan bahwa pendekatan lunak dapat menjadi alternatif efektif bagi strategi nasional yang cenderung *security-centric*. Kolaborasinya dengan BNPT, Ditjenpas, lembaga akademik, dan komunitas lokal mencerminkan tata kelola *multilevel* yang inklusif dan adaptif terhadap konteks sosial Indonesia. Dengan terus memperkuat kolaborasi lintas batas dan memperluas dampak di tingkat akar rumput, Accept International berpotensi menjadi model ideal dalam tata kelola deradikalisasi berbasis kemanusiaan di tingkat global.